

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Perilaku Memilih (*Voting Behaviour*)

Perilaku merupakan sifat alamiah manusia yang membedakannya atas manusia lain, dan menjadi ciri khas individu atas individu yang lain. Dalam konteks politik, perilaku dikategorikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.¹

Definisi tersebut menjelaskan bahwa perilaku dari setiap individu sangatlah unik, karena terjadi perbedaan dalam menentukan setiap tindakannya. Dalam menentukan perilakunya, individu melibatkan beberapa hal yang diantaranya; kognitif seperti; persepsi, perhatian, motivasi, minat, dll, dan psikomotorik atau anggota tubuh seperti; otak, tangan, kaki, telinga, mata, dst.

Sementara dalam konteks perpolitikan, perilaku yang dikategorikan sebagai interaksi yang terjadi antara individu yang satu dengan individu lainnya merupakan sebuah bentuk konsep yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara aktif maupun secara pasif. Konsep perilaku tersebut bisa berupa partisipasi politik. Lebih jauh lagi bahwasanya konsep perilaku turut serta berpartisipasi politik merupakan sebuah hubungan timbale balik yang dilakukan pemerintah dengan masyarakatnya. Perilaku tersebut bisa bersifat

¹ Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. PT.Grasindo. Jakarta. hal 15.

pribadi-pribadi atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Memilih ialah suatu aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok, baik yang bersifat eksklusif maupun yang inklusif. Memilih merupakan aktifitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku memilih ialah keikutsertaan warga Negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum.²

Kaitannya dengan definisi tersebut bahwasanya dalam hal memilih individu setidaknya akan melibatkan 2 hal, diantaranya; pikiran dan perasaan. Pertama, Proses penerimaan informasi, pemahaman terhadap informasi, dan penyikapan atau respon terhadap sebuah informasi merupakan sebuah hal pikiran yang ditunjukkan individu dalam memutuskan sebuah pilihannya.

Dalam hal ini memilih juga dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas informasi atau objek pilihannya, artinya seberapa jauh informasi atau objek pilihan mempengaruhi pikiran individu tersebut untuk menentukan pilihannya (misalnya; seberapa penting dan atau menguntungkan pilihan tersebut), serta intensitas informasi, artinya seberapa lama informasi tersebut berada dibenak pikiran individu. Kedua, adalah perasaan, artinya proses memilih ini berhubungan dengan kecocokan atau ketidakcocokan terhadap objek pilihannya. Perasaan ini bisa berubah-ubah setiap waktu, tergantung mood seseorang. saat dimana kondisi

² Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. PT.Grasindo. Jakarta. hal 15.

seseorang sedang baik (seperti; bahagia, ceria, senang, suka, dll) maka baik pula pilihannya, begitu pula sebaliknya. Jika seseorang pada kondisi badmood (seperti; marah, benci, sedih, dll), maka buruk pula pilihannya.

Perilaku Memilih Secara sederhana bisa didefinisikan sebagai keputusan seorang pemilih dalam memberikan suara kepada kandidat atau partai tertentu baik dalam pemilihan anggota legislatif maupun eksekutif.³

Definisi diatas menunjukkan bahwasanya Indonesia sebagai Negara demokrasi setiap lima tahun sekali selalu melakukan pemilihan umum. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah ini dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi politik. Partisipasi ini secara singkatnya bisa berupa pengambilan peran atau ikut menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pemimpinnya dimasa mendatang. Pemimpin yang menempati posisi sebagai wakil rakyat baik ditingkatan eksekutif maupun legislatif tersebut merupakan sebuah bentuk manifestasi atau perwujudan dari masyarakat dengan cara melaksanakan agenda politik yang diselenggarakan pemerintah (*Voting Behaviour*). Penggunaan hak pilih ini tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek jujur dan luber. *Langsung* berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. *Umum* berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. *Bebas* berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya

³ Hingga akhir 1980-an atau awal 1990-an, kajian tentang voting behavior belum terlampau populer dilakukan di Indonesia. Barangkali tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Afan Gaffar adalah ilmuwan politik yang memelopori kajian voting behavior di Indonesia. Terkait dengan ini, Afan Gaffar menulis disertasi yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul *Javanese Voters: a Case Study of Election under a Hegemonic Party System*, 1992, Jojakarta, Gadjah Mada University Press.

tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian *Rahasia* berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Dalam ilmu politik, dikenal dua macam pendekatan/ aliran/ school/ mazhab dalam menganalisis voting behavior. Salah satunya adalah mazhab Michigan yang dikenal dengan pendekatan psikologis.

B. Pendekatan-Pendekatan Voting Behaviour

1. Mazhab Michigan⁴

Dalam menganalisis voting behavior, pendukung mazhab ini menggunakan pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis berasumsi bahwa keputusan seorang individu dalam memberikan suara kepada kandidat tertentu merupakan persoalan respons psikologis.⁵ Terkait dengan pendekatan psikologis ini, menurut Charles Prysby and Carmine Scavo faktor-faktor berpengaruh terhadap voting behavior sebagai berikut.

a. Kualitas Personal Sang Kandidat.

Di Amerika, di mana konsep ini berkembang, kualitas pribadi seorang kandidat baik moralitas maupun kapabilitas pribadi menjadi bahan pertimbangan sangat penting bagi calon pemilih. Dalam hal ini, bisa diperhatikan betapa tidak sedikit calon Presiden Amerika Serikat gagal karena dianggap tidak bermoral.

⁴ Disebut demikian karena dikembangkan di Michigan University Amerika Serikat.

⁵ Data diambil dari blog: majalah ilmiah renaisans universitas bondowoso pada tanggal 09/05/2013.

b. Performa Pemerintah (Yang Sedang Berkuasa)⁶

Hal ini lazim digunakan pemilih terutama untuk mengevaluasi kandidat (presiden atau kepala daerah) incumbent. Seberapa baik pemerintah di bawah kepemimpinan presiden atau kepala daerah yang sedang mencalonkan kembali sebagai presiden atau kepala daerah di periode berikutnya menjalankan fungsinya menjadi persoalan penting bagi pemilih.

c. Isu-Isu yang Dikembangkan Sang Kandidat

Selain track record suatu pemerintahan, isu-isu yang menjadi agenda seorang kandidat menjadi pertimbangan sangat penting bagi pemilih rasional. Seberapa banyak isu-isu yang dikembangkan seorang kandidat berkesesuaian dengan pandangan (dan kepentingan) calon pemilih yang didasarkan, misalnya, atas agama, (termasuk tingkat keberagaman), ideologi, kepentingan ekonomi pemilih.

d. Loyalitas Terhadap Partai atau Party Identification (PID).

Selain tiga faktor di atas, pemilih memberikan suara kepada kandidat tertentu karena identitas kepartaian yang melekat kepadanya. Dengan kata lain, seberapa kuat “ikatan batin” pemilih terhadap partai politik tertentu berpengaruh terhadap keputusannya untuk memberikan suara kepada kandidat yang berasal dari partai di mana dia menjadi anggota partai tersebut. Dibandingkan ketiga faktor di atas, faktor Party Identification ini jauh lebih stabil melekat pada diri calon pemilih, mengingat proses identifikasi terjadi dalam proses yang tidak sebentar. Bahkan tidak jarang, proses identifikasi

⁶ Mayoritas literatur ilmu politik hanya menyebut tiga variabel berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap voting behavior, tanpa menyebut kualitas pemerintah yang sedang dalam kekuasaan yang mencalonkan kembali.

kepartaian lahir bersamaan dengan proses sosialisasi yang diterima dari keluarga di mana di tumbuh dan berkembang menjadi dewasa.

C. Golput (*Non Voting Behaviour*)

1. Pengertian Golput

Golput dimaknai sebagai perilaku apatisme (jenuh) dengan tema-tema pemilihan.⁷ definisi tersebut menjelaskan bahwa Kejenuhan tersebut disebabkan oleh suatu kondisi psikologis masyarakat yang hampir tiap tahun mengalami pemilu, pilgub, pilkada dan bahkan pilkades. Disisi lain, penyelenggaraan pemilu yang berulang-ulang tak juga memberikan banyak hal terkait perbaikan nasib bagi masyarakat. Pada titik tertentu rasa jenuh tersebut sampai pada rasa tak peduli apakah dirinya masuk dalam daftar pemilih tetap atau tidak sama sekali. Dengan kata lain, golput merupakan akumulasi sikap jenuh masyarakat terhadap seputar pemilu baik janji politik, money politik dan kekerasan politik dan kondisi-kondisi yang tak kunjung membaik.

Dari pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa golput adalah pilihan tidak memilih sebagai bentuk akumulasi rasa jenuh (apatis) masyarakat yang nyaris setiap tahun mengalami pemilihan kepala daerah, golput juga sebagai reaksi atau protes atas pemerintahan dan partai-partai politik yang tidak menghiraukan suara rakyat, perlawanan terhadap belum membaiknya taraf kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, politik, hukum dan budaya. Golput merupakan respon atas ketidakmampuan partai atau

⁷ Data diakses dari situs [Http://tapol.gn.apc.org/elections/updates/MultiChoiseBahasa.pdf](http://tapol.gn.apc.org/elections/updates/MultiChoiseBahasa.pdf) diakses pada tanggal 20 November 2009.

penguasa dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat yang telah menerima mandat.

2. Sejarah Golongan Putih

Pada masa orde baru, penguasa bercorak militeristik begitu kuat, kelompok civil society tak berdaya membendung berbagai kebijakan tak populis. Kondisi demikian mendorong sekelompok intelektual yang dikomandoi Arif Budiman untuk menentang ketidakadilan struktural lewat gerakan moral.

Gerakan moral ini kemudian dikenal dengan golongan putih (golput) yang dicetuskan pada 3 Juni 1971, sebulan menjelang pemilu.⁸ Pada awalnya golput merupakan gerakan untuk melahirkan tradisi di mana ada jaminan perbedaan pendapat dengan penguasa dalam situasi apapun. Gerakan itu lahir didorong oleh kenyataan bahwa dengan atau tanpa pemilu, sistem politik waktu itu tetaplah bertopang kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Lebih-lebih dengan berbagai cara, penguasa melindungi dan mendorong kemenangan Golongan Karya (Golkar), sehingga meminggirkan partai politik lain yang berjumlah 10 kontestan untuk dapat bertanding merebut suara secara fair. Jadi, dalam konteks ini, cikal bakal golput merupakan gerakan moral yang ditujukan sebagai “mosi tidak percaya” kepada struktur politik yang coba dibangun oleh penguasa waktu itu.⁹ Gerakan moral ini memberikan kesan pada publik bahwa putih dibandingkan dengan lawannya, yakni hitam, kotor.

⁸ Diakses dari www.tsanincenter.blogspot.com. Pada tanggal 13/05/2013.

⁹ Data diakses dari situs [Htp://www.sulis.opc/election/update.pdf](http://www.sulis.opc/election/update.pdf). diakses pada tagl 22 November 2009.

Menurut Varma terjadinya golput dinegara berkembang seperti Indonesia lebih disebabkan oleh rasa kecewa dan apatisme.

“Di negara berkembang lebih disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan hasil pemilu yang kurang amanah dan memandang nilai-nilai demokrasi belum mampu mensejahterakan masyarakat. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena terjadi paradoks demokrasi atau terjadi kontraproduktif dalam proses demokratisasi”.¹⁰

Penyataan diatas menunjukkan bahwa Secara empirik peningkatan angka Golput tersebut terjadi antara lain oleh realitas sebagai berikut: *Pertama*, pemilu belum mampu menghasilkan perubahan berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, menurunnya kinerja partai politik yang tidak memiliki *platform* politik yang realistis dan kader politik yang berkualitas serta komitmen politik yang berpihak kepada kepentingan publik, melainkan lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau golongannya. *Ketiga*, merosotnya integritas moral aktor-aktor politik (elit politik) yang berperilaku koruptif dan lebih mengejar kekuasaan/kedudukan daripada memperjuangkan aspirasi publik. *Keempat*, tidak terealisasinya janji-janji yang dikampanyekan elit politik kepada publik yang mendukungnya. *Kelima*, kejenuhan pemilih karena sering adanya Pemilu/Pilkada yang dipandang sebagai kegiatan seremonial yang lebih menguntungkan bagi para elit politik. *Keenam*, kurang netralnya penyelenggara Pemilu/Pilkada yang masih berpotensi melakukan keberpihakan kepada kontestan tertentu, di samping juga kurangnya intensitas sosialisasi Pemilu secara terprogram dan meluas.

¹⁰ Varma, S.P. 2001. *Teori Politik Modern*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal, 295

3. Aspek-Aspek Perilaku Golput

Gandung menyebutkan bahwa Aspek – aspek golput,¹¹ diantaranya;

1. Apatisme politik, yaitu sikap tidak berminat atau tidak menaruh perhatian terhadap orang, situasi, atau gejala-gejala umum yang berkaitan dengan persoalan politik dan kelembagaannya.
2. Sinisme politik merupakan sikap yang dimiliki sebagai penghayatan atas tindakan dan motif orang atau lembaga lain dengan perasaan curiga. Orang-orang sinis selalu menganggap politik itu kotor, bahwa semua politisi tak dapat dipercaya, bahwa rakyat selalu menjadi korban manipulasi partai dan penguasa, dan bahwa setiap rejim selalu dipimpin orang tak amanah
3. Alienasi merupakan perasaan keterasingan dari kehidupan politik dan pemerintahan, sehingga selalu memandang segenap peraturan yang ada sebagai tidak adil dan menguntungkan penguasa.
4. Anomi yaitu perasaan kehilangan nilai dan orientasi hidup, sehingga tak bermotivasi untuk mengambil tindakan yang berarti karena hilangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik yang ada.

¹¹ Ismanto, G, 2008, *memahami eksistensi golput dalam demokrasi*, (Lanskap) yang diakses dari p <http://lanskap-artikel.blogspot.com> memahami-eksistensi-golput-dalam.html pada tanggal 15 Agustus 2013 pukul 15.30 WIB

a. Apatisme Politik

Apatisme politik, yaitu sikap tidak berminat atau tidak menaruh perhatian terhadap orang, situasi, atau gejala-gejala umum yang berkait dengan persoalan politik dan kelembagaannya.¹²

Definisi tersebut menunjukkan bahwasanya apatisme merupakan sikap acuh tak acuh terhadap sebuah hal, dalam hal ini adalah politik. Apatisme masyarakat terhadap politik dilatari oleh dua aspek yaitu rendahnya kepercayaan terhadap politik yang berlangsung dan rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap politik. Apatisme masyarakat bukanlah merupakan tindakan parsial yang tidak terhubung dengan struktur namun merupakan dampak dari struktur yang ada sebagai bentuk protes maupun keputusan terhadap politik yang berlangsung di negaranya.

Dalam kasus apatisme masyarakat terhadap politik khususnya di Indonesia, hal ini terjadi melalui reproduksi wacana dan kesenjangan antara masyarakat dan elit politik. Banyak hal yang melatarbelakangi munculnya apatisme masyarakat tersebut sebagai turunan dari kedua aspek penyebab apatisme politik diatas. Apatisme masyarakat di Indonesia bukan hanya muncul dari rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap agenda politik karena telah terbukti pada setiap pemilihan umum baik itu pemilihan umum kepala daerah maupun pemilihan umum nasional, masyarakat tetap memilih. Apatisme masyarakat di Indonesia mengambil bentuk ketidakacuhan masyarakat terhadap perkembangan politik dengan memvisualisasikan politik sebagai permainan kotor sedangkan dalam ajang pemilihan umum,

¹² Saptamaji, M. Rolip “*apatisme politik masyarakat Indonesia*” dalam Tugas Paper mengenai Isu Politik Kontemporer. Pasca Sarjana Ilmu Politik

masyarakat sebagai pemilih cenderung hanya melakukan ritual demokrasi dengan datang memberikan suara tanpa mempertimbangkan pilihannya dengan baik.

b. Sinisme Politik

sinisme politik merupakan sikap yang dimiliki sebagai penghayatan atas tindakan dan motif orang atau lembaga lain dengan perasaan curiga. Orang-orang sinis selalu menganggap politik itu kotor, bahwa semua politisi tak dapat dipercaya, bahwa rakyat selalu menjadi korban manipulasi partai dan penguasa, dan bahwa setiap rejim selalu dipimpin orang tak amanah¹³

Definisi di atas sejalan dengan pengamatan Simmel, bahwa manusia modern telah menjadikan uang sebagai tujuan utama, padahal sebetulnya uang hanya merupakan sarana. Bersamaan dengan itu, muncullah dampak-dampak negative terhadap individu, seperti sinisme. Dampak ekonomi lainnya adalah reduksi nilai-nilai dalam kehidupan manusia, misalnya : banyak manusia yang menilai sesuatu banyak berdasarkan uang, dan menganggap uang adalah segala-galanya. Selain menunjukkan dampak negatif dari fenomena uang, Simmel juga menegaskan semua yang terkait dengan uang termasuk dampak negative nya juga tergantung pada manusia itu sendiri. Akan tetapi dia juga mengatakan bahwa uang hanyalah sarana, bukan tujuan utama.

Jadi secara garis besar, dalam karyanya *Philosophy Of Money* Simmel mencoba menganalisis mengenai pengaruh adanya uang sebagai alat tukar terhadap perubahan gaya hidup manusia. Sebab utama meningkatnya

¹³ Alifa, syadza “*analisis teori philosophy of money dalam kasus kampanye politik*” jurusan kesejahteraan sosial

kesenjangan ini adalah meningkatnya pembagian kerja di masyarakat modern. Meningkatnya spesialisasi dalam kehidupan masyarakat mengarah pada perbaikan kemampuan untuk menciptakan beragam komponen dunia budaya. Namun, pada saat yang sama, individu yang terspesialisasi kehilangan pemahaman tentang kebudayaan total dan kehilangan kemampuan untuk mengendalikannya.

c. Alienasi

alienasi merupakan perasaan keterasingan dari kehidupan politik dan pemerintahan, sehingga selalu memandang segenap peraturan yang ada sebagai tidak adil dan menguntungkan penguasa.¹⁴

Definisi diatas menjelaskan bahwa Konsep alienasi politik merupakan lawan dari konsep keterikatan atau hubungan politik yang terjadi antara masyarakat dengan negara. Konsep alienasi tersebut memiliki berbagai macam aspek sebagai pemunculannya yaitu ketidakmampuan, sikap apatis, sinisme dan ketidaksenangan terhadap politik.

*The concept of alienation originates from the concept of *entfremdung* used by Marx and by Weber. In political sociology, political alienation has come to refer to the opposite of "political engagement" of any kind, and to include various aspects of inefficacy, apathy, cynicism, and displeasure (Citrin et al., 1975, Mason et al., 1985)*

Alienasi politik menjauhkan masyarakat dari politik dan pemerintahan sehingga memunculkan kekecewaan dan keputusasaan terhadap politik di masyarakat. Sementara, tidak semua politisi dirugikan oleh kurangnya legitimasi masyarakat terhadap kekuasaan. Dalam oligarki,

¹⁴ Saptamaji, M. Rolip "apatisme politik masyarakat indonesia" (Tugas Paper). Pasca Sarjana Ilmu Politik

legitimasi tidaklah diperlukan. Masyarakat yang acuh tak acuh pada setiap agenda politik nasional maupun daerah dapat ditempatkan sebagai floating mass yang hanya diaktifkan dimasa pemilihan. Bagi demokrasi prosedural, aktifitas legal formal demokrasi sangatlah penting namun tidak mencakup substansinya. Hal ini akan bersinergi dengan ketidakacuhan masyarakat, ketika para elit tidak dapat menyampaikan aspirasi masyarakat ataupun tidak lagi menepati janjinya semasa kampanye masyarakatpun hanya kecewa tanpa tindakan protes ataupun upaya advokasi politik bagi kebijakan yang bertentangan dengan masyarakat. Pada akhirnya, status quo akan terus bertahan dan oligarki pun akan tercipta di negara tersebut tanpa disadari oleh masyarakat.

d. Anomi

Anomi yaitu perasaan kehilangan nilai dan orientasi hidup, sehingga tak bermotivasi untuk mengambil tindakan yang berarti karena hilangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik yang ada.¹⁵

Definisi tersebut sejalan dengan penjelasan Durkheim dalam bukunya yang berjudul *The Division of Labor In Society* (1893), menggunakan istilah anomie untuk menggambarkan keadaan deregulation di dalam masyarakat. Keadaan deregulasi oleh Durkheim diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan deregulation atau normlessness inilah yang menimbulkan perilaku deviasi.

¹⁵ data diakses dari situs <http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/04/teori-anomie.html> pada tanggal 23 agustus 2013

4. Bentuk-Bentuk Golput

Perilaku *nonvoting* adalah refleksi protes atau ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan.¹⁶ Definisi tersebut menunjukkan bahwasanya bentuk perilaku golput yang ditampilkan tidak seragam, melainkan beragam. Sekalipun demikian, perilaku golput dalam pemilu diwujudkan secara umum dalam bentuk:

a. Memilih Tidak Hadir ke Bilik Suara.

Sikap ini tidak lain merupakan bentuk protes yang paling nyata. Sikap apatis dan tak mau menggunakan hak pilihnya ini didasarkan pada empat hal, yaitu :

- 1) Sebagai reaksi terhadap pemerintah, anggota DPR dan partai politik yang tak mampu memperbaiki kehidupan ekonomi, sosial dan hukum. Berbagai kebijakan pemerintah telah jauh keluar dari *track* demokrasi, yaitu menjejahterakan kehidupan rakyat.
- 2) Tidak adanya nilai lebih dari proses pemilu ini. Sehingga mereka merasa rugi menghadiri pemilu baik secara tenaga, waktu dan finansial. Nilai lebih ini meliputi kualitas pemilu yang dengannya masyarakat merasa nyaman dan yakin akan pemerintahan yang akan memimpin karena lahir dari proses jujur dan adil.
- 3) Adanya hal yang lebih penting dari sekedar hadir ke bilik suara. Hal penting ini dikaitkan dengan nilai lebih di atas. Artinya jika dengan memberikan suarapun tak dapat merubah apapun, maka mereka berkeyakinan lebih baik tidak datang.

¹⁶ Sanit, Arbi. 1992. *Aneka Pandangan Fenomena Golput*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Hal: 2

- 4) Ketidak hadiran karena malas saja, mereka tidak mau repot dengan politik yang dinilai kotor.¹⁷

Cara ini *ditempuh* sebagai bentuk penyadaran dan membuka mata para pejabat negara, elit politik, anggota dewan dan aktivis partai politik bahwa selama ini rakyat selalu diabaikan dan dibutuhkan pada saat pemilu saja.

b. Mencoblos Semua Gambar (Lebih dari Satu Kali)

Cara ini dipilih didasarkan pada :

- 1) Kehadiran mereka tetap sebagai bentuk protes, walaupun mereka hadir itu dengan tujuan agar kertas suara mereka tak digunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.
- 2) Isu-isu yang dibawa semua partai dan kandidat hanyalah retorika saja, maka respon pendukung golput dengan mencoblos semuanya sebagai jawaban yang menurut pendukung golput rasional.
- 3) Pemilu di Indonesia bagi pendukung golput belum bisa dijalankan secara jujur dan adil, maka pilihan mencoblos semua gambar diyakini paling realistis.
- 4) Memberikan dorongan pada publik agar publik tampil berani menampilkan kekecewaannya secara terang-terangan, tanpa rasa takut.

c. Memasukkan Kertas suara ke kotak secara kosong (tanpa dicoblos)

Cara ini merupakan cara yang paling lemah dalam pandangan pendukung golput. Hal ini dilakukan sebagai sikap transparan dan dengan tujuan mereka yang selama ini takut melampiaskan kekecewaannya mendapatkan teman sehingga punya keberanian.

¹⁷ Asfar, *Presiden golput* hal 244-245

5. Tujuan Golput

Bagi pendukung golput, perilaku tidak memilih bagian dari tindakan yang memiliki pesan. Karenanya golput bukan tanpa tujuan, golput menjadi alat protes politik yang tidak sempat tersuarakan, akumulasi kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap realitas politik yang dilihat kemudian disalurkan melalui sikap apatis terhadap pemilu.¹⁸ Sebab itu, melihat golput harus dapat mengkontekstualisasikan dengan keadaan dan realitas yang berkembang. Interpretasi perilaku politik tidak dapat diserahkan pada penjelasan teoritis semata.

Maka perilaku golput sejujurnya secara umum dimaksudkan sebagai simbol protes atas sistem yang tidak adil, sistem yang hanya menguatkan posisi kelompok minoritas (elit) dan mengabaikan substansi demokrasi yang bertujuan membangun peradaban masyarakat yang lebih baik. Yang terpenting lagi adalah golput ditujukan pada tiadanya amanah dari elit dan pemimpin bangsa dalam menjalankan roda kekuasaannya. Protes tersebut ditujukan pada pemerintah yang korup dan tidak akuntabel. Maka kondisi demikian menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat luas.

Pendukung golput tidak hanya berasal dari satu garis partai, melainkan seluruh partai dan organ-organ sosial. Semuanya melihat dengan jelas betapa massif retorika politik yang dibangun untuk mengelabui rakyat. Karenanya parlemen dan pemerintah dinilai penyebab lahirnya diskriminasi sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya di negara ini.

¹⁸ Asfar, *Presiden..* 127.

D. Partai Politik

1. Pengertian Parpol

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹

Berdasarkan teori yang telah banyak diterima secara luas, Sudijono Sastroatmodjo menyebutkan bahwa infrastruktur politik terdiri atas komponen-komponen:

- a. Partai politik (Political Party)
- b. Kelompok kepentingan (Interest group)
- c. Kelompok penekan (Pressure group)
- d. Media komunikasi politik (Political communication media)
- e. Tokoh politik (Political figure)

Jadi, partai politik (parpol) merupakan salah satu bagian dari sistem politik yang ada dalam suatu negara. Parpol merupakan salah satu infrastruktur politik, yaitu struktur politik kemasyarakatan yang memiliki peran cukup penting dalam arah kebijakan politik.

¹⁹ Lihat Undang-undang republik indonesia Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik diakses dari situs www.kpu.go.id/peraturankpu/partaipolitik.

Partai politik maupun infrastruktur politik yang lain sama-sama memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Tetapi ada perbedaan yang membedakan partai politik dengan infrastruktur politik yang lain. Salah satunya adalah partai politik merupakan organisasi resmi yang bisa menjadi peserta dalam pemilihan umum.

Banyak batasan atau definisi yang diberikan oleh para ahli terhadap partai politik. Parpol sebagai : Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan pengawasan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan pengawasan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material.²⁰

Definisi tersebut menekankan bahwa tujuan dari partai politik adalah merebut dan mempertahankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menempatkan orang-orangnya dalam parlemen yang terlebih dahulu harus berusaha memenangkan pemilihan umum.

Definisi tersebut sejalan dengan pendapat dari Roger H. Soltau, yang mengatakan bahwa Partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang memakai kekuasaan memilih bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

²⁰ Menurut Carl J Friedrich dalam buku Budiardjo, 1993 hal 161 yang diakses dari <http://google.com.repository.upi.edu/operator/upload>.

Dalam perkembangan studinya, definisi konsep partai politik mengalami perubahan dalam setiap jaman, sehingga tidak ada definisi tunggal yang bisa diterima secara universal di seluruh dunia tentang konsep partai politik. Tetapi secara prinsipil, menurut Joseph Schumpeter, definisi partai politik memiliki kesamaan dalam hal tujuan umum (*general aim*), yaitu, “ *The first and foremost aim of each political party is to prevail over the others in order to get into power or to stay in it*” . Jadi, menurutnya dalam setiap definisi partai politik akan mengandung kekuasaan sebagai tujuan umum pada setiap partai politik di manapun.

2. Tujuan Parpol

Tujuan dari partai politik di Indonesia tercantum dalam undang-undang. Pengaturan tujuan ini adalah supaya partai politik di Indonesia yang berjumlah sangat banyak itu bisa berdiri dan bergerak ke arah yang sama — yaitu mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur — walaupun dibungkus dengan ideologi dan *flatform* yang berbeda. Tujuan dari partai politik di Indonesia, dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 dibagi menjadi tujuan khusus dan tujuan umum.

Pasal 10 ayat (1) dan (2), yaitu:

(1) Tujuan umum partai politik adalah:

- a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

- (2) Tujuan khusus partai politik adalah:
- a.meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
 - b.memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c.membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Fungsi Parpol

Fungsi partai politik berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh partai politik, dan dampaknya terhadap sistem politik. Setiap aktivitas partai politik, terutama partai mayoritas, akan mengalami dampak terhadap struktur dan fungsi pemerintahan secara proses politik di dalamnya. Sehingga wajar apabila sarjana-sarjana ilmu politik menaruh perhatian cukup besar terhadap partai politik, terutama di negara-negara demokratis, dan negara yang sedang mengalami masa transisi demokrasi.

Keberadaan Partai politik di Indonesia salah satunya diatur oleh UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Undang-undang tersebut mengatur tentang fungsi dari parpol di Indonesia yang tertuang dalam pasal 11, yaitu :

Pasal 11

- (1)Partai politik berfungsi sebagai sarana :
- a.pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b.penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c.penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
 - d.partisipasi politik Warga Negara Indonesia; dan
 - e.rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Sudah banyak ahli yang memberikan pendapatnya perihal fungsi partai politik. Namun dari beberapa pendapat ahli mengenai fungsi partai politik, terdapat beberapa fungsi yang tampaknya selalu terkandung, baik secara eksplisit maupun implisit. Fungsi-fungsi tersebut adalah :

a. Fungsi Rekrutmen Politik

Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik adalah bahwa partai politik berperan dalam mempersiapkan calon-calon pemimpin dalam sistem politik. Partai politik harus mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Cecep Darmawan menyebutkan bahwa “partai politik berfungsi sebagai rekrutmen politik artinya mempersiapkan anggota masyarakat untuk menduduki jabatan-jabatan politik dalam pemerintahan”. Parpol memiliki peran strategis dalam pengisian jabatan-jabatan politik dalam pemerintahan. Parpol merekrut anggota masyarakat yang dianggap berbakat untuk menjadi kadernya, kemudian parpol mempersiapkan kadernya untuk menempati jabatan-jabatan kepemimpinan dalam suprastruktur politik.

b. Fungsi Pendidikan Politik

Partai politik, terutama dalam negara berkembang yang masih membutuhkan pembentukan karakter warga negara yang kuat, memiliki amanat yang cukup berat. Mereka dituntut untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang melek politik (*political literacy*).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 memberikan amanat kepada partai politik di Indonesia untuk menjalankan fungsi pendidikan politik. Dalam UU tersebut pendidikan politik yang dimaksud adalah “... proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Partai politik diharapkan mampu untuk memberikan suatu pendidikan kepada masyarakat dengan cara-cara yang sesuai dengan kebijakan internal masing-masing supaya masyarakat sadar akan hak-hak yang bisa ia terima dan kewajiban yang harus ia laksanakan yang nantinya akan membentuk warga negara yang bertanggungjawab.

c. Fungsi Sosialisasi Politik

Sosialisai politik menurut Miriam Budiardjo adalah “proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada”. Jadi sosialisasi politik menurutnya adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik seseorang.

Proses sosialisasi politik ini berlangsung secara terus menerus seumur hidup yang bisa diperoleh secara sengaja, seperti melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal, atau juga secara tidak sengaja seperti pengalaman hidup sehari-hari.

Dalam memenangkan pemilu, tentunya partai politik memerlukan dukungan masyarakat. Untuk itu parpol harus berusaha menciptakan “*image*” bahwa mereka adalah parpol yang layak dipilih. Untuk itu parpol harus menyosialisasikan pesan politik mereka kepada masyarakat.

Berdasarkan segi penyampaian pesan, sosialisai politik menurut Ramlan Surbakti dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Dalam pendidikan politik parpol berusaha menyampaikan pesan-pesan - entah itu berupa simbol, program, visi misi atau yang lainnya - terbaiknya dalam berbagai kegiatan yang diharapkan mampu dinilai sendiri dengan penuh kesadaran oleh masyarakat. Sedangkan indoktrinasi politik dilakukan ketika partai politik melakukan mobilisasi dan memanipulasi masyarakat untuk memilih mereka.

d. Fungsi Komunikasi Politik

Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik menurut Miriam Budiardjo adalah proses penyampaian pendapat dan aspirasi masyarakat, yang sebelumnya sudah melewati proses agregasi dan perumusan kepentingan, kepada pemerintah. Selain itu partai politik pun berperan untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Pendapat itu senada dengan pendapat Kantaprawira yang menilai bahwa “Komunikasi politik berguna untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institut, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintahan”.

Partai politik dalam hal penyampaian pendapat masyarakat kepada pemerintah harus terlebih dahulu menyerap berbagai kepentingan masyarakat dan selanjutnya dituangkan menjadi ide-ide, visi dan kebijakan. Kemudian disampaikan kepada pemerintah dengan harapan ide,

visi dan kebijakan tersebut dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menjadi kebijakan kenegaraan.

Selain berperan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, partai politik pun berkewajiban menyampaikan kebijakan-kebijakan ataupun program-program pemerintah kepada masyarakat. Untuk menjalankan fungsi ini, Ramlan Surbakti berpendapat : “ Partai politik tidak menyampaikan begitu saja segala informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi merumuskan sedemikian rupa sehingga penerima informasi (komunikasikan) dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan”.

Jadi, segala kebijakan pemerintah yang biasanya diungkapkan dalam bahasa teknis yang rumit harus dikemas ke dalam bahasa yang sederhana yang mampu dicerna dengan mudah oleh masyarakat, terutama lapisan bawah.

e. Fungsi Pengatur Konflik

Dalam kehidupan tidak bisa dielakkan terjadinya sebuah konflik. Konflik disebabkan oleh keberagaman pandangan dari setiap individu manusia atau kelompok. Dalam negara demokrasi setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya yang mungkin antara satu dengan yang lainnya saling berbeda atau bertolak belakang.

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan aspirasi dan permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk

mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Oleh karena itu dibutuhkan kesediaan berkompromi di antara para wakil rakyat, yang berasal dari partai-partai politik.

4. Parpol Peserta Pemilu 2014

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) tanggal 25 maret 2013 yang dikeluarkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/kpts/KPU/tahun 2013 Penetapan Nomor Urut partai politik Pemilu tahun 2014 yang diantaranya : 1. Partai Nasional Demokrat (Nasdem), 2. Partai Kebangkitan Bangsa(PKB), 3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), 5. Partai Golongan Karya (Golkar), 6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), 7. Partai Demokrat, 8. Partai Amanat nasional (PAN), 9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 10. Partai hati Nurani Rakyat (HANURA), 11. Partai Bulan Bintang (PBB), dan 12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).²¹

²¹ www.kpu.go.id

a. Profil Partai Politik Peserta Pemilu 2014

Nomor Urut : 1 (Satu)



Partai NasDem

GERAKAN PERUBAHAN

Lambang Partai :

Nama Parpol : Nasional Demokrat (NasDem)

Ketua : Surya Paloh

Sekjen : Patrice Rio Capella

Bendahara : Frankie Turtan

Alamat Kantor DPP: Jl. RP. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta
10350

Telp : 021- 3929801

Fax : 021- 31927288

Sumber : Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :
M.HH-03.AH.11.01 TAHUN 2013 Tanggal 6 Maret 2013 Tentang
Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan dan Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem.

Nomor Urut : 2 (Dua)



Lambang Partai :

Nama Parpol : Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Ketua : H. A. Muhaimin Iskandar

Sekjen : H. Imam Nahrawi

Bendahara : H. Bachrudin Nasori

Alamat Kantor DPP : Jl. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat 10430

Telp : 021- 3145328

Fax : 021- 3145329

Email : dpp@pkb.or.id

Website : www.dpp.pkb.or.id

Sumber : Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-25.AH.11.01 TAHUN 2012 Tanggal 7 September 2012 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014.

Nomor Urut : 3 (Tiga)



Lambang Partai :

Nama Parpol : Partai keadilan Sejahtera (PKS)

Ketua : Muhammad Anis Matta

Sekjen : Muhamad Taufik Ridlo

Bendahara : Mahfudz Abdurrahman

Alamat Kantor DPP : Jl. TB. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jkt
21520

Telp : 021- 78842116

Fax : 021- 78846456

Email : setjen.dpp@pks.or.id

Sumber : Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :
M.HH-13.AH.11.01 TAHUN 2011 Tanggal 19 September 2011 Tentang
Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat, Perubahan Anggaran
Dasar dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan
Sejahtera.

Nomor Urut : 4 (empat)

4



Lambang partai : **PDI
PERJUANGAN**

Nama Parpol : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Ketua : Megawati Soekarnoputri

Sekjen : Tjahjo Kumolo

Bendahara : Olly Dondokambey

Alamat Kantor DPP : Jl. Lenteng Agung No. 99 Jakarta Selatan 12610

Telp : 021- 7806028, 021- 7806032

Fax : 021- 7814472

Sumber : Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :
M.HH-13.AH.11.01 TAHUN 2010 Tanggal 29 September 2010 Tentang
Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan
Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan.

Nomor Urut : 5 (Lima)



Lambang Partai :

Nama Parpol : Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Ketua : H. Aburizal Bakrie

Sekjen : Idrus Marham

Bendahara : Drs. Setya Novanto

Alamat Kantor DPP : Jl. Anggrek Nelly Murni, Jakarta 11480

Telp : 021- 5302222

Fax : 021- 5303380

Website : www.partai-golkar.or.id

Sumber : Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2010 Tanggal 27 April 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009-2015.

Nomor Urut : 6 (enam)



Lambang partai :

Nama Parpol : Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Ketua : Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc.

Sekjen : H. Ahmad Muzani, S. Sos

Bendahara : Thomas A. Muliatna Djiwandono, MA

Alamat Kantor DPP : Jalan Harsono RM No. 54 Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12550

Telp : 021- 7892377, 021- 7801396

Fax : 021- 7819712

Sumber : Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :
M.HH-13.AH.11.01 TAHUN 2012 Tanggal 23 Juli 2012 Tentang Pengesahan
Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan
Kepengurusan Partai Gerakan Indonesia Raya.

Nomor Urut : 7 (Tujuh)



Lambang Partai :

Nama Parpol : Partai Demokrat

Ketua : Dr. Susilo Bambang Yudhoyono

Sekjen : Edhie Baskoro Yudhoyono, M. Sc

Bendahara : Handoyo Mulyadi

Alamat Kantor DPP : Jl. Kramat Raya No. 146, Jakarta Pusat, Jakarta 10450

Telp : 021- 31907999

Fax : 021- 31908999

Sumber : Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2013 Tanggal 18 April 2013 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

Nomor Urut : 8 (Delapan)



Lambang partai : **PARTAI AMANAT NASIONAL**

Nama Parpol : Partai Amanat Nasional (PAN)

Ketua : M. Hatta Rajasa

Sekjen : Taufik Kurniawan

Bendahara : Jon Erizal

Alamat Kantor DPP : Jl. Warung Buncit Raya No. 17 Jakarta Selatan

Telp : 021- 7975588

Fax : 021- 7975632

Sumber : Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2010 Tanggal 6 April 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2010-2015.

Nomor Urut : 9 (Sembilan)

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN



Lambang Partai :

Nama Parpol : Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Ketua : Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si.

Sekjen : Ir. H. M. Romahurmuziy, MT

Bendahara : Drs. H. Mahmud Yunus

Alamat Kantor DPP : Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta 10310

Telp : 021- 31926164, 021- 31936338

Fax : 021- 3142558

Sumber : Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :
M.HH-20.AH.11.01 TAHUN 2012 Tanggal 4 September 2012 Tentang
Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai
Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015.

Nomor Urut : 10 (Sepuluh)



Lambang Partai :

Nama Parpol : Partai hati Nurani Rakyat (Hanura)

Ketua : H. Wiranto

Sekjen : Dossy Iskandar Prasetyo

Bendahara : Bambang Sudjagad

Alamat Kantor DPP : Jl. Imam Bonjol No. 4, Menteng, Jakarta Pusat,
100330

Telp : 021- 3100169

Fax : 021- 3100174

Sumber : Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :
M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2010 Tanggal 11 Mei 2010 Tentang
Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan
Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat
Periode 2010-2015.

Nomor Urut : 11 (Sebelas)



Lambang Partai :

Nama Parpol : Partai Bulan Bintang (PBB)

Ketua : Dr. H. MS. Kaban, SE, M.Si

Sekjen : B.M. Wibowo, SE, MM

Bendahara : Sarinandhe Djibran, SH

Alamat Kantor DPP : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B, Jakarta

Selatan

Telp : 021- 79180734

Fak : 021- 79180765

Sumber : Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :

M.HH-30.AH.11.01 TAHUN 2012 Tanggal 12 November 2012 Tentang

Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat

Partai Bulan Bintang Periode 1431-1436 H/2010-2015 M.

Nomor Urut : 12 (Dua Belas)



Lambang Partai :

Nama Parpol : Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Ketua : Letjen TNI (Purn) Dr. (Hc) H. Sutiyoso, SH

Sekjen : Drs. H. Lukman F. Mokoginta, M. Si

Bendahara : Linda Setiawati

Alamat Kantor DPP : Jl. Pangeran Antasari Nomor 68, Cipete Utara,
Jakarta 12150

Telp : 021- 7246174

Fak :021- 7253952

Email : jkarta2002@yahoo.com

Website : www.pkp-garuda.or.id

Sumber : Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor :
M.HH-12.AH.11.01. TAHUN 2010 tanggal 27 Agustus 2010 Tentang
Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan
Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia Masa Bakti 2010-2015.